

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **2.1. Konsep Kesejahteraan Sosial**

Kesejahteraan sosial mencakup berbagai tindakan yang dilakukan manusia untuk mencapai taraf hidup yang lebih baik, taraf hidup yang lebih baik ini tidak hanya diukur secara ekonomi dan fisik belaka, tetapi juga ikut memperhatikan aspek sosial, mental dan segi kehidupan spiritual. Kesejahteraan sosial merupakan suatu sistem yang berisikan pelayanan sosial yang membantu individu, kelompok, maupun masyarakat. Kesejahteraan sosial dapat diartikan sebagai kondisi sejahtera dari suatu masyarakat, kesejahteraan sosial pada umumnya meliputi kesehatan, keadaan ekonomi, kebahagiaan dan kualitas hidup rakyat.

##### **2.1.1. Pengertian Kesejahteraan Sosial**

Kesejahteraan sosial menjadi impian sebagian besar masyarakat, termasuk masyarakat. Ilmu kesejahteraan sosial mungkin masih terdengar asing di kalangan masyarakat Indonesia saat ini, namun sangat dibutuhkan keberadaannya untuk mencapai suatu kemakmuran, kesejahteraan dan agar dapat menjalankan fungsi sosialnya. Definisi kesejahteraan sosial menurut Friedlander dalam Fahrudin (2014:9) mendefinisikan kesejahteraan sosial sebagai berikut:

Sistem yang terorganisir dari pelayanan-pelayanan sosial institusi-institusi yang dirancang untuk membantu individu-individu dan kelompok-kelompok guna mencapai standar hidup dan kesehatan yang dapat mengembangkan kemampuan dan kesejahteraan sosial sepenuhnya selaras dengan kebutuhan-kebutuhan keluarga dan masyarakat.

Kesejahteraan sosial adalah institusi sosial yang terorganisir yang berfungsi untuk membantu individu, kelompok ataupun masyarakat yang mempunyai masalah sosial serta dalam mengembangkan kemampuan dengan tujuan untuk mencapai standar kehidupan dan peningkatan kesejahteraan sesuai dengan kebutuhan mereka. Definisi masalah sosial menurut Soeharto (2009:151) yaitu:

Masalah sosial sebagai terganggunya keberfungsian sosial individu, kelompok atau komunitas sehingga mempengaruhi kemampuan mereka dalam memenuhi kebutuhan, merealisasikan nilai-nilai yang dianutnya, serta menjalankan peranan-perannya di masyarakat.

Masalah sosial dapat mempengaruhi kemampuan seorang individu untuk memenuhi kebutuhan dasarnya seperti sandang, pangan dan papan, dan tidak adanya penyesuaian antara ukuran-ukuran nilai sosial dengan kenyataan yang terjadi antara individu sebagai makhluk sosial dengan lingkungannya. Masalah sosial juga berpengaruh pada peran-peran yang seharusnya dianut oleh individu dalam masyarakat. Masalah sosial memerlukan suatu upaya atau pun aksi sosial sebagai pemecahan masalah melalui usaha kolektif masyarakat. Aksi sosial sebagai upaya pemecahan masalah berkesinambungan dengan kesejahteraan, dengan adanya upaya tersebut derajat kesejahteraan masyarakat meningkat.

Kesejahteraan sosial secara komperhensif, dapat dibagi menjadi 3 kategori, yaitu: kesejahteraan sosial sebagai usaha dan institusi, kesejahteraan sosial sebagai disiplin akademik, kesejahteraan sosial sebagai gambaran suatu masyarakat. Kesejahteraan sosial sebagai usaha dan institusi menurut Findler dalam Fahrudin (2012:19), adalah:

Kesejahteraan sosial adalah sistem pelayan-pelayan dan insitusi-institusi sosial yang terorganisir, yang dirancang untuk membantu individu-individu dan kelompok-kelompok untuk mencapai standar kehidupan dan kesehatan, serta hubungan-hubungan pribadi dan sosial yang memuaskan yang memungkinkan mereka untuk mengembangkan kemampuan-kemampuan penuh mereka dan untuk meningkatkan kesejahteraan mereka sesuai dengan kebutuhan-kebutuhan keluarga mereka dan masyarakat.

Kesejahteraan sosial adalah institusi sosial yang terorganisir yang ditujukan untuk membantu individu, kelompok atau pun masyarakat yang mempunyai masalah sosial dan mengembangkan kemampuan mereka secara penuh untuk mencapai standar kehidupan mereka, dan agar dapat meningkatkan kesejahteraan mereka sesuai dengan kebutuhan mereka. Kesejahteraan sosial dalam hubungan dengan institusi menurut Khan dalam Fahrudin (2012:23) adalah:

Kesejahteraan sosial sebagai suatu institusi terdiri atas kebijakan-kebijakan dan program-program yang dengan itu pemerintah menjamin suatu tingkat minimum tertentu untuk pelayanan-pelayanan sosial, uang, dan hak-hak konsumsi, dengan menggunakan kriteria akses atau kriteria distribusi selain kriteria pasar.

Kesejahteraan sosial sebagai institusi terdiri atas kebijakan dan program sebagai upaya membantu pemenuhan kebutuhan masyarakat dengan menggunakan kriteria pasar yang berupa aksi sosial sebagai upaya kolektif antara individu dengan individu, individu dengan kelompok ataupun masyarakat dengan pemerintah.

Kesejahteraan sosial sebagai disiplin ilmu akademik merujuk pada pengembangan pemikiran tentang ilmu kesejahteraan sosial itu sendiri. Kesejahteraan sosial sebagai disiplin akademik menurut Zastrow dalam Fahrudin (2012:31) adalah:

Kesejahteraan sosial berasal dari peranannya sebagai suatu disiplin akademik. Dalam hubungan ini, kesejahteraan sosial adalah studi tentang lembaga-lembaga, program-program, personel dan kebijakan-kebijakan yang

memuaskan pada pemberian pelayanan-pelayanan sosial kepada individu-individu, kelompok-kelompok, dan masyarakat-masyarakat.

Kesejahteraan sosial sebagai disiplin akademik adalah studi mengenai lembaga kesejahteraan sosial, program, kebijakan dalam pemberian pelayanan kepada masyarakat. Ini juga berguna bagi terwujudnya pekerja sosial yang berkompeten dalam bidang kesejahteraan sosial dengan mempelajari ilmu kesejahteraan sosial.

### **2.1.2. Tujuan Kesejahteraan Sosial**

Menurut Fahrudin (2012:10) menyatakan kesejahteraan sosial mempunyai tujuan.

Tujuannya adalah sebagai berikut:

- 1) Untuk mencapai kehidupan yang sejahtera dalam arti tercapainya standar kehidupan pokok seperti sandang, perumahan, pangan, kesehatan, dan relasi-relasi sosial yang harmonis dengan lingkungannya.
- 2) Untuk mencapai penyesuaian diri yang baik khususnya dengan masyarakat di lingkungannya, misalnya dengan menggali sumber-sumber, meningkatkan, dan mengembangkan taraf hidup yang memuaskan.

Berdasarkan kutipan di atas, tujuan kesejahteraan sosial berfokus pada pola pencapaian kehidupan pokok manusia yang mencakup kebutuhan ekonomi fisik, ekonomi, sosial, serta penyesuaian diri terhadap taraf hidup yang memuaskan bagi kehidupannya.

### **2.1.3. Fungsi Kesejahteraan Sosial**

Kesejahteraan sosial memiliki fungsi yang bertujuan untuk menghilangkan dan mengurangi tekanan-tekanan yang diakibatkan terjadinya perubahan-perubahan sosio-ekonomi, menghindarkan terjadinya konsekuensi-konsekuensi sosial yang negatif akibat pembangunan serta mampu menciptakan kondisi yang mampu mendorong

peningkatan kesejahteraan masyarakat. Menurut Friedlander dan Apte (Fahrudin, 2012: 2) fungsi kesejahteraan sosial adalah sebagai berikut:

- a. Fungsi Pencegahan (*Preventive*).  
Kesejahteraan sosial ditujukan untuk memperkuat individu, keluarga, dan masyarakat supaya terhindar dari masalah-masalah sosial baru. Dalam masyarakat transisi, upaya pencegahan ditekankan pada kegiatan-kegiatan untuk membantu menciptakan pola-pola baru dalam hubungan sosial serta lembaga-lembaga sosial baru.
- b. Fungsi Penyembuhan (*Curative*).  
Kesejahteraan sosial ditujukan untuk menghilangkan kondisi- kondisi ketidakmampuan fisik, emosional, dan sosial agar orang yang mengalami masalah tersebut dapat berfungsi kembali secara wajar dalam masyarakat. Dalam fungsi ini juga tercakup dengan fungsi pemulihan atau rehabilitasi.
- c. Fungsi Pengembangan (*Development*).  
Kesejahteraan sosial berfungsi untuk memberikan sumbangan langsung ataupun tidak langsung dalam proses pembangunan atau pengembangan tatanan dan sumber-sumber daya sosial dalam masyarakat
- d. Fungsi Penunjang (*Supportive*).  
Fungsi ini mencakup kegiatan-kegiatan untuk membantu mencapai tujuan sektor atau bidang pelayanan sosial yang lain.

Berdasarkan kutipan di atas, fungsi-fungsi kesejahteraan sosial meliputi fungsi pencegahan, penyembuhan, pengembangan, penunjang bagi kehidupan masyarakat. Fungsi-fungsi ini dapat digunakan sesuai dengan kebutuhan, situasi, serta kondisi masyarakat itu sendiri.

#### **2.1.4. Pendekatan Kesejahteraan Sosial**

Pendekatan-pendekatan kesejahteraan sosial merupakan hal yang penting bagi penunjang pelaksanaan aktivitas keilmuan dan praktik kesejahteraan sosial. Menurut Midgley dalam Adi (2005:51) pendekatan- pendekatan kesejahteraan sosial sebagai berikut:

1) Filantropi sosial

Filantropi terkait erat dengan upaya-upaya kesejahteraan sosial yang dilakukan para agamawan dan relawan, yakni upaya yang bersifat amal (*charity*) dimana orang-orang ini menyumbangkan waktu, uang, dan tenaganya untuk menolong orang lain. pelaku dari filantropi ini disebut dengan filantropis

2) Pekerjaan sosial

Berbeda dengan pendekatan yang sebelumnya yaitu filantropi pekerjaan sosial disini merupakan pendekatan yang teroganisir untuk mempromosikan kesejahteraan sosial dengan menggunakan tenaga professional yang memenuhi syarat untuk menangani masalah sosial. Perkembangan pekerjaan sosial sendiri juga tidak lepas dari adanya filantropi. Pada abad ke-19 pekerjaan sosial telah mengalami pengembangan professional dan akademik yang cukup pesat dan telah menyebar di seluruh dunia.

3) Administrasi sosial

Pendekatan administrasi sosial berusaha mempromosikan kesejahteraan sosial dengan menciptakan berbagai macam program guna meningkatkan kesejahteraan warga negaranya, biasanya dengan penyediaan pelayanan sosial. Pendekatan ini dilakukan oleh pemerintah.

4) Pembangunan sosial

Pembangunan sosial merupakan suatu proses perubahan sosial terencana yang dirancang untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat secara utuh, di mana pembangunan ini dilakukan untuk melengkapi dinamika proses pembangunan ekonomi.

Pendekatan kesejahteraan sosial terdiri dari filantropi sosial, pekerjaan sosial, administrasi sosial dan pembangunan sosial. Filantropi yang sifatnya *charity* atau awal merupakan pendekatan yang pertama sebelum berkembang pada pendekatan yang lainnya. Setelah adanya filantropi sosial, muncul pendekatan kedua yaitu pekerjaan sosial yang lebih fokus pada penanganan masalah sosial. Administrasi sosial yang lebih dikenal dengan pemberian program atau pelayanan sosial dari pemerintah untuk masyarakat nya. Yang terakhir adalah pembangunan sosial yang erat kaitannya dengan pembangunan ekonomi, pembangunan sosial disini harus terencana karena bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat.

## 2.2. Konsep Pekerjaan Sosial

Pekerjaan sosial adalah profesi pertolongan yang profesional. Pekerjaan sosial sendiri memfokuskan kepada kegiatan pemberian pelayanan sosial agar individu, kelompok dan masyarakat mampu menjalankan keberfungsial sosialnya atau fungsi sosialnya dengan baik. Menurut asosiasi nasional pekerjaan sosial Amerika Serikat (NASW) dalam Fahrudin (2014:60):

*Social work is the professional activity of helping individuals, groups or communities to enhance or restore their capacity for social functioning and to create societal conditions favorable to their goals. Social work practice consist of the professional application of social work values, principles, and techniques to on or more of the following ends: helping people obtain tangible services; providing counselling and psychotherapy for individuals, families, and groups; helping communities or groups; helping communities or groups provide or improve social and health services; and participating in relevant legislative processes. The practice of social work requires knowledge of human development and behavior; of social, economic, and cultural institutions; and of the interaction of all these factors.* (Pekerjaan sosial adalah kegiatan profesional untuk membantu individu, kelompok, atau komunitas untuk meningkatkan atau memulihkan kapasitas mereka untuk fungsi sosial dan untuk menciptakan kondisi sosial yang menguntungkan bagi tujuan mereka. Praktik pekerjaan sosial terdiri dari penerapan nilai-nilai, prinsip, dan teknik kerja sosial secara profesional pada atau lebih dari. Pekerjaan sosial juga memiliki tujuan sebagai berikut: membantu orang mendapatkan layanan nyata; memberikan konseling dan psikoterapi untuk individu, keluarga, dan kelompok; membantu masyarakat atau kelompok; membantu masyarakat atau kelompok memberikan atau meningkatkan layanan sosial dan kesehatan; dan berpartisipasi dalam proses legislatif yang relevan. Praktek pekerjaan sosial membutuhkan pengetahuan tentang perkembangan dan perilaku manusia; dari intitusi sosial, ekonomi, dan budaya; dan interaksi semua faktor ini)

Terkait dengan kutipan di atas, pekerjaan sosial tidak lepas dari penerapan nilai, prinsip, dan tujuan yang mereka miliki. Pekerjaan sosial sendiri berfokus pada proses pertolongan yang dilakukan kepada individu, kelompok maupun masyarakat. Proses

pertolongan ini diberikan kepada mereka yang memang memiliki disfungsi sosial atau keberfungsian sosial yang tidak berjalan dengan baik.

Keberfungsian sosial dapat diartikan sebagai berjalan atau tidaknya peran seseorang di dalam masyarakat. Keberfungsian sosial merupakan resultant dari interaksi individu dengan berbagai sistem sosial di masyarakat, seperti sistem pendidikan, sistem keagamaan, sistem keluarga, sistem politik, sistem pelayanan sosial, dan seterusnya. Suharto (2010:5). Tujuan praktik pekerjaan sosial menurut NASW yang dikutip Fahrudin (2014:66) adalah:

1. Meningkatkan kemampuan-kemampuan orang untuk memecahkan masalah, mengatasi (*coping*), perkembangan.
2. Menghubungkan orang dengan sistem-sistem yang memberikan kepada mereka sumber-sumber, pelayanan-pelayanan, dan kesempatan-kesempatan.
3. Memperbaiki keefektifan dan bekerjanya secara manusiawi dari sistem-sistem yang menyediakan orang dengan sumber-sumber dan pelayanan-pelayanan.
4. Mengembangkan dan memperbaiki kebijakan sosial.

Menurut Fahrudin (2014:71) mengatakan bahwa secara tradisional pekerja sosial mempunyai tiga metode pokok dan tiga metode pembantu, yaitu:

“(1) Metode Pokok: *Social Case Work, Social Group Work, Dan Community Organization/Community Development*. (2) Metode Pembantu: *Social Work Administration, Social Action, dan Social Work Research*”.

Metode-metode tersebut digunakan berdasarkan dan kebutuhan dari klien yang ditangani oleh para pekerja sosial. Semua tergantung kepada kasus atau masalah yang ada, sehingga penanganannya perlu disesuaikan sehingga dapat bisa ditangani dengan efektif dan efisien.



*Social case work* atau metode intervensi sosial pada individu ini merujuk pada upaya yang dilakukan untuk memperbaiki atau meningkatkan keberfungsian sosial individu dengan tujuan agar individu atau keluarga dapat bereperan dengan baik sesuai dengan tugas dalam lingkup sosial maupun individu mereka.

*Social group work* atau metode intervensi sosial pada kelompok merupakan suatu upaya pada kelompok kecil. Kelompok kecil ini bisa diartikan sebagai kelompok yang terdiri dari dua orang atau lebih dan mereka saling berinteraksi satu sama lainnya secara langsung, di mana mereka sadar keberadaan mereka sebagai anggota kelompok, keberadaan kelompok yang lain dan mempunyai ikatan atau bergantung satu sama lain, serta mempunyai keinginan untuk mencapai tujuan bersama. Kelompok tersebut yang nantinya dibentuk dengan sengaja dan dapat digunakan untuk meningkatkan keberfungsian sosial anggotanya.

*Community organization/community development (CO/CD)* merupakan salah satu metode dalam dalam praktik pekerjaan sosial dengan fokus utama adalah level komunitas atau masyarakat yang lebih luas. *Community organization/community development (CO/CD)* lebih dikenal dengan sebutan pengembangan masyarakat di Indonesia. Praktik ini berhubungan dengan kegiatan-kegiatan yang dilakukan untuk meningkatkan tingkat keberfungsian sosial suatu masyarakat.

*Social work administration* (administrasi pekerja sosial) merujuk pada upaya melakukan praktik administrasi ketika melakukan praktik dengan metode pokok, misalnya adalah membuat laporan, membuat *form* assesment, dan sebagainya. *Social action* (aksi sosial) merujuk pada upaya yang dilakukan oleh pekerja sosial untuk

memperjuangkan hak-hak kelompok yang tertindas oleh kelompok yang lain, misalnya adalah melakukan kampanye atau advokasi. Sementara *social work research* (penelitian pekerjaan sosial) merujuk pada melakukan penelitian terhadap isu-isu yang digarap oleh pekerja sosial, misalnya adalah melakukan penelitian tentang isu-isu kesejahteraan sosial atau tene kebijakan yang menyangkut kesejahteraan.

Pekerja sosial dalam melakukan intervensi pekerjaan sosial selain menggunakan metode pekerja sosial, pekeria sosial juga menjalankan peran-peran tertentu baik pada level individu, keluarga maupun komunitas dan masyarakat. Beberapa peranan pekerja sosial menurut Zastrow dikutip Huraerah (2018:149) yaitu: "*Enabler, Broker, Expert, Social Planner, Acvocate, dan The Activist*"

*Enabler* merupakan pekerja sosial yang bertujuan untuk membantu individu, kelompok, komunitas atau masyarakat agar dapat mengartikulasikan atau mengungkapkan kebutuhan-kebutuhan mereka, menjelaskan dan mengidentifikasi masalah-masalah mereka, dan mengembangkan kemampuan mereka agar dapat menangani masalah yang dialaminya dengan lebih efektif dengan menggunakan sistem sumber yang tersedia di masyarakat.

*Broker* merupakan peranan pekerja sosial yang bertujuan untuk menghubungkan individu, kelompok, komunitas atau masyarakat ke sistem sumber yang ada di lingkungannya. Sistem sumber merupakan segala sesuatu yang bisa digunakan untuk mengatasi permasalahan yang sedang dialami. Seringkali mereka bisa mengakses sistem sumber tersebut, maka dari itu tugas pekerja sosial adalah untuk membantu mereka dalam memperolehnya.

*Expert* merupakan peranan pekerja sosial yang bertujuan untuk menyediakan informasi dan memberikan saran-saran dalam berbagai area. Pekerja sosial memberikan masukan-masukan yang membangun dalam upaya untuk mencapai kondisi sejahtera. Biasanya peranan ini dilakukan ketika pekerja sosial sudah menjadi ahli, lalu mereka akan memberikan masukan-masukan terhadap praktik pekerjaan sosial dan kebijakan sosial yang akan dibuat, agar usaha kesejahteraan sosial dalam berjalan dengan efektif dan efisien.

*Social Planner* merupakan peranan pekerja sosial yang bertujuan untuk mengumpulkan fakta-fakta tentang masalah sosial yang terjadi dan menganalisis fakta tersebut serta menyusun alternatif tindakan apa yang akan dilakukan dalam upaya untuk mengatasinya. Pekerja sosial bertindak sebagai perencana sosial yang menyusun rencana setelah melakukan analisis masalah dan membuat alternatif untuk mengatasinya.

*Advocate* merupakan peranan pekerja sosial yang bertujuan untuk melakukan advokasi yakni mewakili atau menjadi representasi dari kelompok yang membutuhkan pertolongan ataupun pelayanan, tetapi institusi yang seharusnya memberikan pertolongan atau pelayanan tersebut tidak melakukan hal tersebut atau bahkan menolak tuntutan yang ditujukan oleh suatu kelompok.

*The Activist* merupakan peranan pekerja sosial yang bertujuan untuk merangsang kelompok-kelompok yang tidak beruntung untuk melakukan tindakan melawan struktur kekuasaan yang ada dan menjadi kelompok penekan bagi mereka. Pekerja sosial harus mendorong kelompok-kelompok tertindas tersebut untuk menekan

kelompok yang telah menindasnya, untuk menuntut hak atas dirinya dalam lingkungan sosial. Peranan-peranan pekerja sosial tidak hanya dalam bentuk-bentuk di atas, terdapat beberapa peranan lain yang bisa dilakukan oleh seorang pekerja sosial ketika melakukan praktik pekerjaan sosial dan dalam menjalankan kebijakan sosial.

### **2.2.1. Fokus Pekerjaan Sosial**

Pekerjaan sosial sebagai proses pertolongan memiliki banyak peranan yang disesuaikan dengan situasi dan kondisi selama pelaksanaan dari awal proses. Adapun perananan yang dimiliki oleh pekerja sosial yaitu sebagai fasilitator, mediator, broker, pembimbing, perencana, pemecah masalah, dan evaluator. Peranan tersebut mengawal pekerja sosial menuju peningkatan keberfungsian sosial yang kinerjanya dapat dilihat dari beberapa strategi pekerjaan sosial menurut Dubois dan Miley yang dikutip oleh Suharto (2007:5) sebagai berikut:

- a. Meningkatkan kemampuan orang dalam menghadapi masalah yang dialaminya
- b. Menghubungkan orang dengan system dan jaringan sosial yang memungkinkan mereka menjangkau dan memperoleh berbagai sumber, pelayanan dan kesempatan.
- c. Meningkatkan kinerja lembaga- lembaga sosial sehingga mampu memberikan pelayanan sosial secara efektif, berkualitas, dan berkeprimanusiaan.
- d. Merumuskan dan mengembangkan perangkat hukum dan peraturan yang mampu menciptakan situasi yang kondusif bagi tercapainya pemerataan ekonomi dan keadilan sosial.

Pekerja sosial dalam melaksanakan tugasnya, tidak sama dengan profesi seperti psikologi, dokter, psikiater. Contohnya, ketika mengobati seorang pasien maka psikolog hanya berfokus pada kejiwaan pasiennya saja. Namun, berbeda dengan pekerja sosial yang ketika menghadapi klien, mereka tidak hanya melihat kepada target

perubahan, melainkan kepada lingkungan sosial di mana pasien berada, bagaimana orang-orang di sekelilingnya yang juga memiliki pengaruh yang besar kepada keadaan klien. Ruang pekerja sosial adalah menolong klien sebagai pelayanan sosial baik untuk individu, keluarga, kelompok, baik masyarakat yang membutuhkannya menggunakan nilai-nilai, pengetahuan, dan keterampilan profesional pekerja sosial. Fokus utama dari pekerjaan sosial adalah meningkatkan keberfungsian sosial (fungsi sosial) melalui serangkaian proses yang memiliki tujuan dan strategi.

Keberfungsian sosial merupakan konsep yang memiliki substansi yaitu keterkaitan, hubungan, interaksi individu dengan berbagai sistem sosial di masyarakat seperti sistem keagamaan, sistem pendidikan, sistem pelayanan sosial, sistem keluarga, sistem politik dan lain-lain. Contohnya adalah kemampuan individu dalam menjalankan peran sosial adalah kemampuan seseorang dalam menjalankan tugas-tugas kehidupannya sesuai dengan status sosialnya.

### **2.2.2. Fungsi Pekerjaan Sosial**

Pekerjaan sosial dalam penyelenggaraannya meliputi fungsi-fungsi tersendiri. Penunjang terhadap tujuannya juga yaitu Siporin dalam Sukoco (1992:52-54) membagi fungsi dasar pekerjaan sosial menjadi empat bagian sebagai berikut:

1. Mengembangkan, memelihara dan memperkuat sistem kesejahteraan sosial sehingga dapat memenuhi kebutuhan-kebutuhan dasar manusia.
2. Menjamin memadainya standar-standar subsistensi, kesehatan dan kesejahteraan bagi semua orang.
3. Meningkatkan kemampuan orang untuk melaksanakan fungsinya secara optimal sesuai dengan status dan peranan mereka di dalam institusi-institusi sosial.
4. Mendorong dan meningkatkan ketertiban sosial (*social order*) serta struktur institusional masyarakat.

Berdasarkan kutipan di atas, dapat diketahui bahwa fungsi-fungsi pekerjaan sosial yaitu berfokus pada kebutuhan-kebutuhan dasar. standar kesehatan dan kesejahteraan, status dan peranan dalam institusi sosial. ketertiban sosial. struktur institusional yang ada pada masyarakat demi tercapainya keberfungsian sosial.

### **2.2.3. Prinsip- Prinsip Pekerjaan Sosial**

Pekerjaan sosial sebagai proses yang tentunya profesional, dalam ketentuannya memiliki prinsip-prinsip yang menaungi dan mengiringi dalam kelangsungannya. Menurut Mans dalam Adi (1994: 16-19), ada enam prinsip dasar dalam praktek pekerjaan sosial yaitu sebagai berikut:

1. Penerimaan  
Prinsip ini mengemukakan tentang pekerja sosial yang menerima klien tanpa "menghakimi" klien tersebut sebelum, pekerja sosial untuk menerima klien dengan sewajarnya (apa adanya) akan lebih membantu pengembangan relasi antara pekerja sosial dengan kliennya. Dengan adanya sikap menerima (menerima keadaan klien apa adanya) maka klien akan dapat lebih percaya diri dan dengan demikian ia (klien) dapat mengungkapkan berbagai macam perasaan dan kesulitan yang mengganjal di dalam pembicaraan
2. Komunikasi  
Prinsip komunikasi ini dengan mudah dapat mendukung. Untuk komunikasi dengan klien, baik dalam bentuk komunikasi yang verbal, yang meminta klien melalui sistem klien, maupun bentuk komunikasi nonverbal, seperti cara membuka klien, memilih cara duduk, duduk dalam suatu pertemuan dengan anggota keluarga yang lain.
3. Individualisasi  
Prinsip individualisasi pada intinya mempertimbangkan setiap individu yang berbeda satu sama lain, sehingga seorang pekerja sosial haruslah mengatur cara memberi kliennya, guna mendapatkan hasil yang diinginkan.
4. Partisipasi  
Berdasarkan prinsip ini, seorang pekerja sosial harus meminta kliennya untuk mendorong aktif dalam upaya memecahkan masalah yang dihadapinya, sehingga klien dapat menggunakan sistem klien yang juga menyediakan rasa bantuan untuk bantuan tersebut. Karena tanpa ada kerja sama dan peran serta klien maka upaya bantuan sulit untuk mendapatkan hasil yang optimal.

5. Kerahasiaan

Prinsip kerahasiaan ini akan memungkinkan klien atau sistem klien mengungkapkan apa yang sedang ia rasakan dan bahaya ia hadapi dengan rasa aman, karena ia yakin apa yang ia utarakan dalam hubungan kerja dengan pekerja sosial akan tetap dijaga (dirahasiakan) oleh pekerja sosial agar tidak diketahui oleh orang lain (mereka yang tidak berkepentingan).

6. Kesadaran diri pekerja sosial.

Prinsip kesadaran diri ini menuntut pekerja sosial untuk menjalin relasi profesional dengan menjalin relasi dengan kliennya, dalam arti pekerja sosial yang mampu menggerakkan benar-benar terhanyut oleh perasaan atau bantuan yang disampaikan oleh kliennya tidak "kaku" dalam percakapan dengan pekerja sosial, yang pesan informasi atau cara bicara, cara berbicara, dan lain-lain, bantuan dengan setiap tanggung jawab terhadap keberhasilan proses.

#### **2.2.4. Tahapan- Tahapan Intervensi Pekerjaan Sosial**

Intervensi yang dilakukan oleh pekerja sosial akan melalui beberapa tahapan.

Dalam pelaksanaannya tahapan- tahapan ini disebut dengan tahapan intervensi pekerjaan sosial. Siporin dalam Iskandar (2013:65) menyatakan terdapat 6 tahapan intervensi pekerjaan sosial yaitu sebagai berikut:

a. Tahap *engagement, intake* dan *contract*

Tahap ini adalah tahap permulaan pekerja sosial bertemu dengan klien. Dalam proses ini terjadi pertukaran informasi mengenai apa yang dibutuhkan klien, pelayanan apa yang akan diberikan oleh pekerja sosial dan lembaga sosial dalam membantu memenuhi kebutuhan klien atau memecahkan masalah klien. Kontrak diartikan sebagai suatu kesepakatan antara pekerja sosial dengan klien yang di dalamnya dirumuskan hakekat permasalahan klien, tujuan- tujuan pertolongan yang hendak dicapai, peranan- peranan dan harapan- harapan pekerja sosial dan klien, metode – metode pertolongan yang akan digunakan serta pengaturan- pengaturan lainnya.

b. Tahap *Assessment*

*Assessment* merupakan proses pengungkapan dan pemahaman masalah klien, yang meliputi: bentuk masalah, ciri- ciri masalah, ruang lingkup masalah, faktor- faktor penyebab masalah, akibat dan pengaruh masalah, upaya pemecahan masalah yang terdahulu yang pernah dilakukan klien, kondisi keberfungsian klien saat ini dan berdasarkan hal itu semua maka dapat ditentukan fokus atau akar masalah klien

c. Tahap Membuat Perencanaan Intervensi

Rencana intervensi merupakan proses rasional yang disusun dan dirumuskan oleh pekerja sosial yang meliputi kegiatan- kegiatan apa yang dilakukan untuk memecahkan masalah klien, apa tujuan pemecahan masalah tersebut.

- d. Tahap Melaksanakan Program Berdasarkan Rencana Intervensi  
Pekerja sosial mulai melaksanakan program kegiatan pemecahan masalah klien. Dalam pemecahan masalah ini hendaknya pekerja sosial melibatkan klien secara aktif pada setiap kegiatan.
- e. Tahap Evaluasi  
pada tahap ini pekerja sosial harus mengevaluasi kembali semua kegiatan pertolongan yang dilakukan untuk melihat tingkat keberhasilannya, kegagalannya atau hambatan yang terjadi. Ada dua aspek yang harus dievaluasi oleh pekerja sosial yaitu tujuan hasil dan tujuan proses
- f. Tahap Terminasi  
tahap terminasi dilakukan bilamana tujuan pertolongan telah dicapai atau bilamana terjadi kegiatan referral atau bilamana karena alasan- alasan yang rasional klien meminta pengakhiran pertolongan atau karena adanya faktor-faktor eksternal yang dihadapi pekerja sosial atau karena klien lebih baik dialihkan ke lembaga- lembaga atau tenaga ahli lainnya yang lebih berkompeten. Pembagian kerja yang jelas akan mempermudah pelaksanaan pelayanan sosial sampai pada tujuan yang diharapkan.

Penjelasan dari enam tahapan intervensi pekerjaan sosial di atas merupakan suatu tahapan – tahapan yang harus dipahami oleh seluruh pekerja sosial. Tahapan – tahapan ini bisa diterapkan pada individu, kelompok, dan masyarakat.

#### **2.2.5. Peran- Peran Pekerja Sosial**

Peran pekerja sosial dalam menangani masalah mencakup masalah tiga level yakni, level mikro (individu), mezzo (keluarga dan kelompok kecil) dan makro (organisasi atau masyarakat). Pada masing-masing level peran pekerja sosial memiliki metode-metode yang berbeda-beda dalam penanganannya. Di level mikro dikenal sebagai *casework* (terapi perseorangan atau terapi klinis), di level mezzo ada beberapa metode *groupwork* (terapi kelompok) dan *family therapy* (terapi keluarga) dan pada



level makro menggunakan metode *community development* (pengembangan masyarakat) atau *policy analysis* (analisis kebijakan).

Menurut Bradford W. Sheafor dan Charles R. Horejsi, sebagaimana dikutip oleh Suharto (2014:155) peran yang dilakukan pekerja sosial dalam suatu masyarakat atau badan atau lembaga atau panti sosial akan beragam tergantung pada permasalahan yang dihadapinya. Peranan yang dilakukan oleh perkerja sosial antara lain:

1. Peranan Sebagai Perantara (*Broker Roles*),  
Pekerja sosial menghubungkan antara anak asuh dengan sistem sumber baik bantuan berupa materi ataupun non materi yang ada di suatu badan atau lembaga atau panti sosial baik panti asuhan, panti rehabilitasi dan lain-lainnya. Sebagai perantara pekerja sosial juga harus berupaya untuk mencari suatu jaringan kerja dengan suatu organisasi atau perusahaan yang dapat membantu pelayanan yang dibutuhkan
2. Peranan Sebagai Pemungkin (*Enabler Role*),  
Peranan ini merupakan peran pekerja sosial yang sering digunakan dalam profesinya karena peran ini menggunakan konsep pemberdayaan dan difokuskan pada kemampuan, keahlian, kapasitas, dan kompetensi anak asuh untuk menolong dirinya sendiri. Pada penanan ini pekerja sosial berperan sebagai konselor berusaha untuk memberikan peluang agar kebutuhan dan kepentingan anakasuh dapat terpenuhi dan terjamin, mengidentifikasi tujuan, memfasilitasi untuk berkomunikasi, serta memberikan peluang untuk pemecahan masalah yang dihadapi anak asuh. Anak asuh melakukan semaksimal mungkin kemampuan dan kompetensi yang dimilikinya agar dapat bermanfaat dan dapat mengatasi permasalahannya.
3. Peranan Sebagai Penghubung (*Mediator Role*),  
Peran pekerja sosial sebagai penghubung (mediator role) adalah bertindak untuk mencari kesepakatan, sebagai penengah dalam perbedaan, konflik antar anak asuh dengan keluarga, konflik antar anak asuh yang satu dengan yang lain, untuk mencapai kesepatan yang memuaskan dan memperoleh hak-hak yang semestinya.
4. Peranan Sebagai Advokasi (*Advocator Role*),  
Peran yang dilakukan oleh pekerja sosial disini berbeda dengan advokat hukum. Advokat hukum dituntun melalui keinginan hukum sesuai dengan hukum pada suatu negara, sedangkan untuk advokat pekerja sosial dibatasi oleh kepentingan yang timbul dari anak asuh atau penerima pelayanan.

5. Peranan Sebagai Perunding (*Conferee Role*),  
Peranan yang diasumsikan ketika pekerja sosial dan anak asuh atau penerima layanan mulai bekerja sama. Peran pekerja sosial ini dilakukan ketika pencarian data, pemberian gambaran pada korban.
6. Peranan Pelindung (*Guardian Role*),  
Peran pekerja sosial sebagai pelindung (*guardian role*) sering kali dilakukan oleh bidang aparat, akan tetapi pekerja sosial dapat berperan melindungi anak asuh atau penerima pelayanan, juga orang-orang yang beresiko tinggi terhadap kehidupannya.
7. Peranan Sebagai Fasilitasi (*Fasilitator Role*),  
Seorang fasilitator pekerja sosial harus memberikan pelayanan yang bervariasi dalam memberikan pelayanannya tergantung pada kebutuhan serta masalah yang dihadapi anak asuh hal ini bertujuan agar anak asuh tidak merasa tertekan dan jenuh dengan pelayanan yang diberikan apabila pelayanan tersebut bervariasi dan menarik bagi anak asuh. Disamping itu peran ini sangat penting untuk membantu meningkatkan keberfungsian anak asuh khususnya yang berkaitan dengan kebutuhan dan tujuan yang ingin dicapai yaitu dalam pemecahan masalah yang dihadapi anak asuh.
8. Peranan Sebagai Inisiator (*Inisiator Role*),  
Peranan yang memberikan perhatian pada masalah atau hal-hal yang berpotensi untuk menjadi masalah.
9. Peranan Sebagai Negosiator (*Negotiator Role*)  
Peran ini dilakukan terhadap anak asuh yang mengalami konflik atau permasalahan dan mencari penyelesaiannya dengan kompromi dengan persetujuan dan kesepakatan bersama antar kedua belah pihak. Posisi seorang negosiator berbeda dengan mediator yang posisinya netral. Seorang negosiator berada pada salah satu posisi yang sedang memiliki konflik.

### **2.3. Konsep Pemberdayaan**

Pemberdayaan adalah suatu upaya yang dilakukan oleh seseorang maupun kelompok melalui berbagai kegiatan pemberian keterampilan, pengembangan pengetahuan, penguatan kemampuan atau potensi yang mendukung agar dapat terciptanya kemandirian, dan keberdayaan pada masyarakat baik itu dari segi ekonomi, sosial, budaya, maupun pendidikan untuk membantu memecahkan berbagai masalah-masalah yang dihadapi.

### **2.3.1. Pengertian Pemberdayaan**

Pemberdayaan tidak akan lepas dari peningkatan kemampuan seseorang atau upaya yang dilakukan seseorang untuk meningkatkan keberdayaan dirinya. Pemberdayaan bisa diterapkan pada individu, keluarga, dan yang paling luas adalah masyarakat. Pemberdayaan menurut Suharto (2010:58) adalah sebagai berikut:

Pemberdayaan adalah proses peningkatan kemampuan seseorang dalam arti pengetahuan, keterampilan, dan juga kemampuan agar dapat memfasilitasi dan mengendalikan kekuatan sosial, ekonomi, dan atau politik masyarakat. Pemberdayaan adalah sebuah proses dengan mana orang menjadi cukup kuat untuk memenangkan dalam, berbagi pengontrolan atas, dan mempengaruhi terhadap peristiwa-peristiwa serta lembaga-lembaga yang mempengaruhi kehidupannya. Pemberdayaan ini menekankan bahwa orang memperoleh keterampilan, pengetahuan, dan kekuasaan yang cukup untuk mempengaruhi kehidupannya dan kehidupan orang lain yang menjadi perhatiannya.

Dari definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa pemberdayaan adalah peningkatan kemampuan seseorang mulai dari pengetahuan, keterampilan, dan juga kemampuan dirinya untuk bisa memfasilitasi dan mengendalikan berbagai hal, yaitu sosialnya, ekonominya, dan politik. Pemberdayaan juga dapat dikatakan sebagai penguatan seseorang agar bisa mengontrol dan mempengaruhi orang lain maupun lembaga-lembaga. Pemberdayaan ini menekankan bahwa orang memperoleh keterampilan, pengetahuan, dan kekuasaan yang cukup untuk mempengaruhi kehidupannya dan kehidupan orang lain yang menjadi perhatiannya.

Menurut Papilaya dalam Zubaedi (2007:42) “Pemberdayaan adalah suatu upaya untuk membangun daya itu, dengan cara mendorong, memotivasi, dan membangkitkan kesadaran akan potensi yang dimilikinya serta berupaya untuk mengembangkannya”. Selain itu, menurut Payne yang dikutip oleh Isbandi (2008:77)

bahwa suatu pemberdayaan (*empowerment*), pada intinya ditujukan guna membantu klien memperoleh daya untuk mengambil keputusan dan menentukan tindakan yang akan ia lakukan yang terkait dengan diri mereka, termasuk mengurangi efek hambatan pribadi dan sosial dalam melakukan tindakan, hal ini dilakukan melalui peningkatan kemampuan dan rasa percaya diri untuk menggunakan daya yang ia miliki, antara lain melalui transfer daya dari lingkungan

Sebelum melaksanakan pemberdayaan, langkah lebih baik mengetahui dasar-dasar dari pemberdayaan tersebut agar lebih bisa memahami bagaimana pelaksanaan pemberdayaan. Menurut Payne dalam Isbandi (2008:77) dasar-dasar pemberdayaan antara lain:

- a. Pemberdayaan adalah proses kerja sama antara masyarakat dan pelaksana kerja secara bersama-sama yang sifatnya *mutual benefit*.
- b. Proses pemberdayaan memandang sistem masyarakat sebagai komponen dan kemampuan yang memberikan jalan kesumber penghasilan dan memberikan kesempatan.
- c. Masyarakat harus merasa bahwa dirinya sebagai agen bebas yang dapat mempengaruhi.
- d. Kompetensi diperoleh atau diperbaiki melalui pengalaman hidup, pengalaman khusus yang kuat dari pada keadaan yang menyatakan apa yang dilakukan.
- e. Pemberdayaan meliputi jalan ke sumber-sumber penghasilan dan kapasitas untuk menggunakan sumber-sumber pendapatan tersebut dengan cara efektif.
- f. Proses pemberdayaan adalah masalah yang dinamis, sinergis, pernah berubah, dan evolusioner yang selalu memiliki banyak solusi.
- g. Pemberdayaan adalah pencapaian melalui struktur-struktur paralel dari perseorangan dan perkembangan masyarakat. Berdasarkan pemaparan diatas, maka dapat dikatakan bahwa pemberdayaan adalah proses menyeluruh: suatu proses aktif antar motivator, fasilitator dan kelompok masyarakat perlu diberdayakan melalui peningkatan pengetahuan, keterampilan, pemberian berbagai kemudahan serta peluang untuk mencapai akses sistem sumber daya dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

### **2.3.2. Prinsip – Prinsip Pemberdayaan Masyarakat**

Menurut Suharto (2014: 68) prinsip-prinsip pemberdayaan masyarakat dalam mewujudkan kesejahteraan sosial bagi masyarakat, sesuai dengan kebutuhan, potensi, harapan, masalah yang ada di masyarakat sesuai dengan yang berikut:

1. Pemberdayaan adalah proses kolaboratif. Oleh karena itu harus ada kerjasama sebagai partner.
2. Proses pemberdayaan menempatkan masyarakat sebagai aktor atau subjek yang kompeten dan mampu menjangkau sumber-sumber dan kesempatan - kesempatan
3. Masyarakat harus melihat diri mereka sendiri sebagai agen penting yang dapat mempengaruhi perubahan.
4. Kompetensi diperoleh dan dipertajam melalui pengalaman hidup, khususnya pengalaman yang memberikan perasaan mampu di masyarakat.
5. Solusi-solusi yang berasal dari situasi khusus, harus beragam dan menghargai keberagaman yang berasal dari faktor-faktor yang berada pada situasi masalah tersebut.
6. Jaringan- jaringan sosial informal merupakan sumber dukungan yang penting bagi penurunan dan meningkatkan kompetensi serta kemampuan untuk mengendalikan seseorang.
7. Masyarakat harus berpartisipasi dalam memberdayakan diri mereka sendiri, tujuan, cara dan hasil harus dirumuskan oleh mereka sendiri.
8. Tingkat Kesadaran merupakan kunci dalam pemberdayaan, karena pengetahuan dan mobilisasi tindakan bagi perubahan.
9. Pemberdayaan melibatkan akses terhadap sumber-sumber dan kemampuan untuk menggunakan sumber-sumber tersebut secara efektif.
10. Proses pemberdayaan bersifat dinamis, sinergis, evolutif, dikarenakan permasalahan selalu memiliki beragam solusi.
11. Pemberdayaan dicapai melalui struktur-struktur personal lain melalui pembangunan ekonomi secara paralel.

Berbagai konsep pemberdayaan masyarakat yang berlaku dan darinya dijadikan acuan, maka secara umum kegiatan- kegiatan pemberdayaan masyarakat yang banyak dilakukan dapat dikelompokkan dalam beberapa kegiatan, yaitu sebagai berikut:

#### **a) Bantuan Modal**

Salah satu aspek yang dihadapi oleh masyarakat yang tidak berdaya adalah permodalan. Tidak adanya modal mengakibatkan masyarakat

tidak mampu berbuat sesuatu untuk dirinya sendiri dan lingkungannya. Pemberdayaan masyarakat dalam aspek ekonomi menjadi faktor penting yang perlu dicermati, yaitu pertama, lemahnya ekonomi masyarakat ini bukan hanya terjadi pada masyarakat yang memiliki usaha, tetapi juga masyarakat yang pendapatannya bergantung pada gaji. Dalam pemberdayaan aspek ini, nampaknya pemberdayaan masyarakat perlu dipikirkan bersama. Kedua, perlunya mencermati usaha pemberdayaan masyarakat melalui aspek permodalan ini adalah 1) bagaimana pemberian modal ini tidak menimbulkan ketergantungan masyarakat; 2) bagaimana pemecahan aspek modal ini dilakukan melalui penciptaan sistem yang kondusif baru melalui usaha mikro kecil, dan menengah untuk mendapatkan akses di lembaga keuangan; 3) bagaimana skema penggunaan atau kebijakan pengalokasian modal ini tidak terjebak pada perkonomian subsistem.

b) Bantuan Pembangunan Prasarana

Usaha untuk mendorong masyarakat berdaya, maka perlu ada sebuah bantuan untuk pembangunan prasarana. Prasarana di tengah-tengah masyarakat yang tidak berdaya akan mendorong mereka menggali potensi yang dimilikinya dan mempermudah mereka melakukan aktifitasnya.

c) Bantuan Pendampingan

Pendampingan masyarakat memang perlu dan penting. Tugas utama pendamping adalah memfasilitasi proses belajar atau refleksi, dan menjadi mediator untuk masyarakat.

d) Kelembagaan

e) Keberadaan sebuah lembaga atau organisasi di tengah-tengah masyarakat merupakan salah satu aspek penting untuk menciptakan keberdayaan. Adanya lembaga akan mempermudah masyarakat untuk berkoordinasi, selain mereka dilatih untuk hidup tertib. Fungsi lembaga tersebut untuk memfasilitasi masyarakat dan memberikan kemudahan dalam melakukan akses- akses yang diinginkan seperti permodalan, media, musyawarah, dan sebagainya.

### **2.3.3. Tahapan – Tahapan Pemberdayaan Masyarakat**

Pemberdayaan masyarakat sebagai proses merupakan serangkaian tahap-tahap yang dilakukan oleh semua pihak yang terlibat, pemangku kepentingan, elemen-elemen kemasyarakatan. Tahapan-tahapan yang harus dilalui dalam pemberdayaan menurut Azis yang dikutip oleh Huraerah (2008: 88) sebagaimana berikut:

Pertama, membantu masyarakat dalam menemukan masalahnya. Kedua, melakukan analisis (kajian) terhadap permasalahan tersebut secara mandiri (partisipatif). Kegiatan ini biasanya dilakukan dengan cara curah pendapat, membentuk kelompok-kelompok diskusi, dan mengadakan pertemuan warga secara periodik (terus menerus). Ketiga, menentukan skala prioritas masalah, dalam arti memilah dan memilih setiap masalah yang paling mendesak untuk diselesaikan. Keempat, mencari penyelesaian masalah yang sedang dihadapi, antara lain dengan pendekatan sosio-kultural yang ada di dalam masyarakat. Kelima, lakukan tindakan nyata untuk menyelesaikan masalah yang sedang dihadapi. Keenam, mengevaluasi seluruh rangkaian dan proses pemberdayaan untuk dinilai sejauh mana keberhasilan dan kegagalannya.

Berdasarkan kutipan di atas, dapat diketahui tentang pemberdayaan masyarakat memiliki tahap- tahap tertentu yang dimulai dengan tahap yang membantu masyarakat untuk menemukan masalah, di dalamnya diberikan perubahan kepada pemikiran masyarakat melakukan kajian terhadap masalah yang ditemukan. Selanjutnya tahap dimana dilakukan pemilihan agar dapat terlihat mana masalah yang paling cocok untuk diselesaikan mengingat situasi yang mendesak.

Tahap lain yaitu tahap untuk melakukan perencanaan atas masalah yang akan diselesaikan, termasuk di dalamnya perencanaan program, perencanaan anggaran. Tahap selanjutnya merupakan tahap di mana masyarakat diberi aksi- aksi yang melibatkan tenaga dan pikirannya seperti pelatihan- pelatihan, pembinaan, bantuan. Tahap terakhir yaitu tahap lanjutan dimana masyarakat yang telah mengikuti proses sebelumnya diberi kesempatan untuk berkembang sendiri sesuai kemampuannya, mengevaluasi apapun yang telah dilakukan demi perbaikan kualitas kehidupannya.

#### **2.3.4. Strategi Pemberdayaan**

Konteks pekerjaan sosial pemberdayaan dapat dilakukan melalui tiga aras (*empowerment setting*). Menurut Parson dalam Suharto (2014:66-67) strategi pemberdayaan meliputi:

1. Aras Mikro  
Pemberdayaan dilakukan terhadap klien secara individu melalui bimbingan, konseling, *stress management*, *crisis intervention*, tujuan utamanya membimbing atau melatih klien dalam menjalankan tugas-tugas kehidupannya
2. Aras Mezzo  
Pemberdayaan dilakukan terhadap sekelompok klien sebagai media intervensi. Pendidikan dan pelatihan, dinamika kelompok sebagai strategi dalam meningkatkan kesadaran, pengetahuan, keterampilan, dan sikap-sikap klien agar mereka memiliki kemampuan untuk memecahkan permasalahan yang dihadapinya
3. Aras Makro  
Strategi ini merupakan strategi yang cakupannya sangat luas dan besar, karena sasaran perubahan diarahkan pada sistem lingkungan yang lebih luas. Perumusan kebijakan, perencanaan sosial, kampanye, aksi sosial, *lobbying*, pengorganisasian masyarakat, manajemen konflik, adalah beberapa strategi dalam pendekatan ini. Strategi sistem besar memandang klien sebagai orang yang memiliki kompetensi untuk memahami situasi- situasi mereka sendiri, dan untuk memilih serta menentukan strategi yang tepat untuk bertindak.

#### **2.3.5. Pendekatan Pemberdayaan Masyarakat**

Keberhasilan suatu pemberdayaan sangat dipengaruhi oleh pendekatan pemberdayaan yang digunakan. Proses dan pencapaian tujuan pemberdayaan dapat dicapai dengan menerapkan pendekatan pemberdayaan menurut Suharto (2014:66-67) yang dibagi menjadi 5P sebagai berikut:

1. Pemungkin: menciptakan suasana atau iklim yang memungkinkan potensi masyarakat berkembang secara optimal. Pemberdayaan harus mampu



membebasan masyarakat dari sekat- sekat kultural dan structural yang menghambat

2. Penguatan: memperkuat pengetahuan dan kemampuan yang dimiliki masyarakat dalam memecahkan masalah dan memenuhi kebutuhan-kebutuhannya. Pemberdayaan harus mampu menumbuh- kembangkan segenap kemampuan dan kepercayaan diri masyarakat yang menunjang kemandirian mereka
3. Perlindungan: melindungi masyarakat terutama kelompok- kelompok lemah agar tidak tertindas oleh kelompok kuat, menghindari terjadinya persaingan yang tidak seimbang (apalagi tidak sehat) antara yang kuat dan lemah, dan mencegah terjadinya eksploitasi kelompok kuat terhadap kelompok lemah. Pemberdayaan harus diarahkan pada penghapusan segala jenis diskriminasi dan dominasi yang tidak menguntungkan rakyat kecil.
4. Penyokongan: memberikan bimbingan dan dukungan agar masyarakat mampu menjalankan peranan dan tugas- tugas kehidupannya. Pemberdayaan harus mampu menyokong masyarakat agar tidak terjatuh ke dalam keadaan posisi yang semakin lemah dan terpinggirkan
5. Pemeliharaan: memelihara kondisi yang kondusif agar tetap terjadi keseimbangan distribusi kekuasaan antara berbagai kelompok dalam masyarakat. Pemberdayaan harus mampu menjamin keselarasan dan keseimbangan yang memungkinkan setiap orang memperoleh kesempatan berusaha.

Terkait dengan kutipan di atas, dapat diketahui bahwa pendekatan pemberdayaan terdiri dari 5 bagian di antaranya pembebasan masyarakat dari sekat- sekat menonjol yang selama ini menimbulkan keseganan untuk bergerak dan berubah. Kemudian dilakukan penguatan terhadap masyarakat agar mampu percaya diri atas hal- hal baik yang bisa dibantu dimaksimalkan. Lalu, melindungi masyarakat dari ketertindasan atas persaingan yang tidak sehat, ketimpangan kubu kuat dan lemah serta kecil. Disokong oleh bimbingan dan dukungan lanjut agar peranan dan tugas kehidupannya dapat berjalan dengan seharusnya. Pemeliharaan merupakan pendekatan terakhir agar terjadi situasi yang stabil di antara kelompok- kelompok masyarakat yang

telah diberdayakan sehingga terjadi keselarasan dan keseimbangan yang membuat masyarakat berusaha menjadikan kehidupannya berkualitas.

Dubois dan Milley dalam Suharto (2014:68) memberi beberapa cara atau teknik yang lebih spesifik yang dapat dilakukan dalam pemberdayaan masyarakat:

1. Membangun relasi pertolongan yang: (a) merefleksikan respon empati; (b) menghargai pilihan dan hak klien menentukan nasibnya sendiri (*self-determination*); (c) menghargai perbedaan dan keunikan individu; (d) menekankan kerjasama (*client partnership*).
2. Membangun komunikasi yang: (a) menghormati martabat dan harga diri klien; (b) mempertimbangkan keragaman individu; (c) berfokus pada klien; (d) menjaga kerahasiaan klien.
2. Terlibat dalam pemecahan masalah yang: (a) memperkuat partisipasi klien dalam semua aspek proses pemecahan masalah; (b) menghargai hak- hak klien; (c) merangkai tantangan- tantangan sebagai kesempatan belajar; (d) melibatkan klien dalam pembuatan keputusan dan evaluasi.
4. Merefleksikan sikap dan nilai profesi pekerjaan sosial melalui: (a) ketaatan terhadap kode etik profesi; (b) keterlibatan dalam pengembangan professional, riset, dan perumusan kebijakan; (c) penerjemahan kesulitan-kesulitan pribadi ke dalam isu- isu publik; (d) penghapusan segala bentuk diskriminasi dan ketidaksertaan kesempatan.

#### **2.4. Konsep UMKM**

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) bertujuan menumbuhkembangkan usaha dalam rangka membangun perekonomian nasional berdasarkan demokrasi ekonomi yang berkeadilan. Hal ini mengandung makna, bahwa UMKM merupakan alat perjuangan nasional untuk menumbuhkan dan membangun perekonomian nasional dengan melibatkan sebanyak mungkin pelaku ekonomi berdasarkan potensi yang dimiliki atas dasar keadilan bagi semua pemangku kepentingan.

### **2.4.1. Pengertian UMKM**

Pengertian UMKM berdasarkan Undang-undang No.20 Tahun 2008 tentang UMKM, adalah sebagai berikut: Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam undang-undang. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian, baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha Menengah dan Usaha Besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil.

Undang-undang. Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau anak cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian, baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil atau Usaha Besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam Undang-undang.

Kriteria Usaha Mikro adalah apabila 1) memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; 2) memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp. 300.000.000, 00 (tiga ratus juta rupiah). Sedangkan Usaha Kecil, kriterianya sebagai berikut: 1) kekayaan bersih lebih dari Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan

bangunan tempat usaha; dan 2) memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp.300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp.2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah). Dan Usaha Menengah, kriterianya sebagai berikut 1) kekayaan bersih lebih dari Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp.10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; dan 2) memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp.2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp.50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah).

Definisi dan kriteria tersebut mempertegas, melengkapi, meluruskan, sekaligus menggugurkan beberapa pandangan terdahulu. Misalnya, melengkapi definisi dari Badan Pusat Statistik (BPS) yang memasukkan kuantitas tenaga kerja yang terlibat. Usaha kecil merupakan entitas usaha yang memiliki jumlah tenaga kerja 5 s.d. 19 orang, sedangkan usaha menengah merupakan entitas usaha yang memiliki tenaga kerja 20 s.d. 99 orang.

Mengoreksi Keputusan Menteri Keuangan No. 316/KMK.016/1994 tanggal 27 Juni 1994, usaha kecil didefinisikan sebagai perorangan atau badan usaha yang telah melakukan kegiatan/usaha yang mempunyai penjualan/omzet pertahun setinggi-tingginya Rp.600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) atau aset/aktiva setinggi-tingginya Rp.600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) (di luar tanah dan bangunan yang ditempati) terdiri atas 1) badan usaha (Fa, CV, PT, dan koperasi); dan 2) perorangan (pengrajin/industri rumah tangga, petani, peternak nelayan, perambah hutan, penambang, pedagang barang, dan jasa).

#### **2.4.2. Asas dan Prinsip Pemberdayaan UMKM**

Berdasarkan perundang-undangan, UMKM dalam menjalankan kegiatan usahanya didasari oleh asas-asas sebagai berikut:

- a. Asas Kekeluargaan, yaitu asas yang melandasi upaya pemberdayaan UMKM sebagai bagian dari perekonomian nasional yang diselenggarakan atas dasar demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, keseimbangan, kemajuan, dan kesatuan ekonomi nasional untuk kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia.
- b. Asas Demokrasi Ekonomi, yaitu pemberdayaan UMKM diselenggarakan sebagai kesatuan dari pembangunan perekonomian nasional untuk mewujudkan rakyat.
- c. Asas Kebersamaan, yaitu asas yang mendorong peran seluruh UMKM dan dunia usaha secara bersama-sama dalam kegiatannya untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat.
- d. Asas Efisiensi Berkeadilan, yaitu asas yang mendasari pelaksanaan pemberdayaan UMKM dengan mengedepankan efisiensi berkeadilan dalam usaha untuk mewujudkan iklim usaha yang adil, kondusif, dan berdaya saing.
- e. Asas Berkelanjutan, yaitu asas yang secara terencana mengupayakan berjalannya proses pembangunan melalui pemberdayaan melalui pemberdayaan UMKM yang dilakukan secara berkesinambungan sehingga terbentuk perekonomian yang tangguh dan mandiri.

- f. Asas Berwawasan Lingkungan, yaitu asas pemberdayaan UMKM yang dilakukan dengan tetap memerhatikan dan mengutamakan perlindungan dan pemeliharaan lingkungan hidup.
- g. Asas Kemandirian, yaitu asas pemberdayaan UMKM yang dilakukan dengan tetap menjaga dan mengedepankan potensi, kemampuan, dan kemandirian UMKM.
- h. Asas Keseimbangan Kemajuan, adalah asas pemberdayaan UMKM yang berupaya menjaga keseimbangan kemajuan ekonomi wilayah dalam kesatuan ekonomi nasional.
- i. Asas Kesatuan Ekonomi Nasional, adalah asas pemberdayaan UMKM yang merupakan bagian dari pembangunan kesatuan ekonomi nasional.

Masih berdasarkan perundang-undangan yang sama, prinsip-prinsip pemberdayaan mencakup:

- a. Penumbuhan kemandirian, kebersamaan, dan kewirausahaan UMKM untuk berkarya dengan prakarsa sendiri
- b. Mewujudkan kebijakan publik yang transparan, akuntabel, dan berkeadilan
- c. Pengembangan usaha berbasis potensi daerah dan berorientasi pasar dan berorientasi pasar sesuai dengan kompetensi
- d. Peningkatan daya saing UMKM
- e. Penyelenggaraan perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian secara terpadu.

## **2.5. Konsep *Corporate Social Responsibility***

*Corporate Social Responsibility* atau Tanggung Jawab Sosial perusahaan tidak dapat diartikan secara per kata, karena *corporate social responsibility* atau tanggung jawab sosial perusahaan merupakan suatu bagian yang memiliki istilah sendiri. Tanggung jawab sosial perusahaan, seiring perjalanan waktu menjadi bagian yang tak terpisahkan dari keberadaan perusahaan, karena keberadaan perusahaan di tengah lingkungan memiliki dampak positif maupun negatif.

### **2.5.1. Pengertian *Corporate Social Responsibility***

Tanggung jawab sosial perusahaan sebagai salah satu strategi perusahaan dalam memerankan tanggung jawab terhadap masyarakat sekitar perusahaan beroperasi. Definisi tanggung jawab sosial perusahaan menurut Sankat, Clement K, 2002 dalam Rudito dan Melia (110:2019) adalah

Komitmen usaha untuk bertindak secara etis, beroperasi secara legal dan berkontribusi untuk peningkatan ekonomi bersamaan dengan peningkatan kualitas hidup dari karyawan dan keluarganya, komunitas lokal dan masyarakat secara lebih luas.

Berdasarkan penjelasan tersebut, *corporate social responsibility* atau tanggung jawab sosial perusahaan dilakukan dengan memperhatikan aspek ekonomis, selain ekonomis juga diperhatikan juga dalam aspek sosial, dan lingkungan yang merupakan bagian dari kesejahteraan masyarakat. *Corporate Social Responsibility* juga pengertiannya terdapat dalam Peraturan Perundang-undangan Republik Indonesia, yaitu pada Undang-undang No.40 tahun 2007 tentang perseroan terbatas, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Pasal 74 yang menyatakan:

- 1) Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan
- 2) Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kewajiban perseroan yang dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya perseroan yang pelaksanaannya dilakukan dengan memperhatikan kepatutan dan kewajaran.
- 3) Perseroan yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana ayat (1) dikenai sanksi dengan ketentuan perundang-undangan.
- 4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tanggung jawab sosial dan lingkungan diatur dengan peraturan pemerintah.

Berdasarkan Undang-undang No.40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas mendefinisikan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan dapat diartikan sebagai komitmen perseroan untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi perseroan sendiri, komunitas setempat, maupun masyarakat pada umumnya. Mengenai tanggung jawab sosial perusahaan *The World Business Council for Sustainable Development* dalam Wibisono (2007:5) mendefinisikan:

Tanggung jawab sosial perusahaan adalah komitmen dunia usaha untuk terus menerus bertindak secara etis, beroperasi secara legal dan berkontribusi untuk peningkatan ekonomi, bersamaan dengan peningkatan kualitas hidup dari karyawan dan keluarga sekaligus juga peningkatan kualitas komunitas lokal dan masyarakat secara lebih luas.



Berdasarkan definisi tersebut, dapat dikatakan bahwa tanggung jawab sosial perusahaan merupakan komitmen perusahaan untuk peduli dan turut berkontribusi dalam pengembangan masyarakat dan lingkungan sekitar. Kontribusi perusahaan dalam pengembangan dan pembangunan masyarakat dapat dilakukan dalam berbagai bidang yang tentunya berkaitan dengan kesejahteraan masyarakat.

### **2.5.2. Prinsip-Prinsip *Corporate Social Responsibility* (CSR)**

Perusahaan dalam melakukan aktivitas CSR pada saat ini sudah banyak meninggalkan pendekatan karitatif karena tidak mampu meningkatkan keberdayaan masyarakat lokal. Pendekatan *Community Development* kemudian semakin banyak karena lebih mendekati konsep *empowerment* dan *sustainable development*. Prinsip-prinsip *good corporate governance*, seperti *fairness*, *transparency*, *accountability*, dan *responsibility* menjadi pijakan untuk mengukur keberhasilan program CSR.

Kegiatan CSR yang dilakukan saat ini sudah mulai beragam, disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat setempat berdasarkan *needs assessment*, mulai dari pembangunan fasilitas pendidikan dan kesehatan, pemberian pinjaman modal bagi UMKM, pemberian beasiswa, penguatan kearifan lokal, pengembangan skema perlindungan sosial berbasis masyarakat, dan seterusnya. Crowther David dalam Nor (2011:59) menjelaskan prinsip-prinsip tanggung jawab sosial menjadi tuga, yaitu:

- 1) *Sustainability*, berkaitan dengan bagaimana perusahaan dalam melakukan aktivitas (*action*) tetap memperhitungkan keberlanjutan sumber daya di masa depan. Keberlanjutan juga memberikan arahan bagaimana penggunaan sumber daya sekarang tetap memperhatikan dan memperhitungkan kemampuan generasi masa depan. Dengan demikian, *sustainability* berputar pada keberpihkan dan upaya bagaimana *society* memanfaatkan sumber daya agar tetap memperhatikan generasi masa datang.

- 2) *Accountability*, merupakan upaya perusahaan terbuka dan bertanggung jawab atas aktivitas yang telah dilakukan. Akuntabilitas dibutuhkan, ketika aktivitas perusahaan mempengaruhi dan dipengaruhi lingkungan eksternal. Konsep ini menjelaskan pengaruh kuantitatif aktivitas perusahaan terhadap pihak eksternal dan internal.
- 3) *Transparency*, prinsip penting bagi pihak eksternal. Transparansi merupakan suatu hal yang amat penting bagi pihak eksternal, berperan untuk mengurangi asimetri informasi, kesalahpahaman, khususnya informasi dan pertanggungjawaban berbagai dampak dari lingkungan.

Dari penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa prinsip-prinsip tanggung jawab sosial perusahaan atau *Corporate Social Responsibility* (CSR) dalam pelaksanaannya menurut perusahaan untuk lebih memperhatikan kondisi masyarakat sekitar perusahaan beroperasi serta peduli kepada masyarakat dan lingkungan sekitarnya.

### **2.5.3. Model *Corporate Social Responsibility* (CSR)**

Perusahaan memiliki model masing-masing dalam pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan. Menurut Saidi dan Abidin dalam Suharto (2009:10) ada empat model atau pola tanggung jawab sosial perusahaan yang umumnya diterapkan di Indonesia, yaitu:

1. Keterlibatan langsung, perusahaan menjalankan program tanggung jawab sosial perusahaan secara langsung dengan menyelenggarakan sendiri kegiatan sosial atau menyerahkan sumbangan ke masyarakat tanpa perantara
2. Melalui yayasan atau organisasi sosial perusahaan, perusahaan mendirikan yayasan sendiri di bawah perusahaan atau *group* nya. Model ini merupakan adopsi dari model yang lazim diterapkan di perusahaan-perusahaan di negara maju
3. Bermitra dengan pihak lain, perusahaan menyelenggarakan tanggung jawab sosial perusahaan melalui kerjasama dengan lembaga sosial atau organisasi non pemerintah, instansi pemerintah, universitas atau media massa, baik dalam mengelola dana, maupun dalam melaksanakan kegiatan sosial lainnya.

4. Mendukung atau bergabung dalam suatu konsorium, perusahaan turut mendirikan, menjadi anggota atau mendukung suatu lembaga sosial yang didirikan untuk tujuan sosial tertentu.